

TAJUK

BI Tetap Dukung
Pemulihan

Bank Indonesia (BI) kembali meneguhkan komitmennya tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional tahun depan. Dukungan bank sentral itu ditunjukkan melalui pembelian surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah. Dengan pendanaan BI, pemerintah dapat memfokuskan APBN untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Bank sentral telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam pendanaan APBN sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam jumlah yang besar. Pada 2020, BI telah membeli SBN sebesar Rp 473,4 triliun. Sepanjang 2021, BI mencatat telah melakukan pembelian SBN sebesar Rp 143,3 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I dan Rp 215 triliun untuk penanganan di bidang kesehatan dan kemanusiaan berdasarkan SKB III. Sementara, pada 2022, BI akan kembali membeli SBN sebesar Rp 224 triliun dengan suku bunga rendah untuk membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Pembelian SBN adalah bentuk sinergi stimulus fiskal dan monetar, mengingat defisit APBN 2022 akan mencapai 4,9% dari produk domestik bruto (PDB). Belanja negara pada tahun depan ditargetkan mencapai Rp 2.714,2 triliun yang di antaranya untuk anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur, sehingga membutuhkan pembiayaan senilai Rp 868 triliun.

Gubernur BI Perry Warjiyo berharap ekonomi Indonesia bisa pulih lebih kuat di tahun 2022. Dengan berbagai sinergi antarpemangku kebijakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 4,7-5,5% pada tahun 2022, lebih tinggi dari tahun ini yang diperkirakan 3,4-4,0%. Kinerja pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 yang akan bangkit didorong oleh sinergi dan koordinasi yang erat se- mua pihak untuk bertahan dan bangkit dari pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi juga akan disokong oleh perbaikan ekonomi global. Hal ini akan berdampak pada kinerja eksport yang melanjutkan tren kinerja positif.

Pertumbuhan juga akan didorong oleh kinerja investasi yang meningkat, percepatan vaksinasi Covid-19, pembukaan sektor ekonomi, dan berlanjutnya stimulus kebijakan, baik fiskal maupun monetar. Dari sisi fiskal, pemerintah mengalokasikan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) Rp 414 triliun. Anggaran itu naik 28,8% atau Rp 92,8 triliun dibandingkan rencana awal Rp 321,2 triliun. Anggaran PEN tahun depan diarahkan untuk tetap mendukung penanganan pandemi di bidang kesehatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan insentif untuk dunia usaha agar terus bangkit di masa pemulihan ekonomi.

Sementara tingkat inflasi akan tetap terkendali pada 2022 dan terjaga pada



**Pengendalian
pandemi Covid-19
yang konsisten
diperlukan untuk
menjaga prospek
pemulihan dan
mempercepat
pertumbuhan
ekonomi tahun
depan.**

in terakselerasi jika kasus Covid-19 dapat ditekan. Sebaliknya, bila terjadi lonjakan kasus Covid-19—seperti saat ini dalam sejumlah negara di Eropa—akan memupus harapan. Pengendalian pandemi Covid-19 yang konsisten diperlukan untuk menjaga prospek pemulihan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Tak hanya itu, yang juga perlu diwaspadai adalah dinamika global yang akan menimbulkan potensi risiko di akhir tahun 2021 sampai 2022. Isu-isu ekonomi di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Eropa perlu dicermati. Fluktuasi harga komoditas, disrupti rantai pasok (*supply-chain disruption*) dan beberapa risiko lain seperti geopolitik dan perubahan iklim patut diwaspadai.

Pandemi Covid-19 telah mendisrupsi rantai pasok global, terjadi kelangkaan kontainer, dan biaya logistik melonjak.

Situasi tersebut mengakibatkan jutaan bahan mungkin miliaran produk tidak dapat bergerak sama sekali, menunggu untuk diangkut, sehingga menciptakan antrean dan *backlog* pesanan yang sangat luar biasa. □

POJOK IDE

Presiden: Pola 'jadul' pelayanan investasi harus ditinggalkan.

Layanan terbaik untuk berbagai skala usaha.

FAO minta seluruh negara membuat sistem pertanian pangan yang tangguh.

Pandemi membuka tabir kelemahan sistem pertanian dan ketahanan pangan.

Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Bisnis Properti

Pemberitaan tentang indikasi gagal bayar utang perusahaan properti raksasa Tiongkok, Evergrande, dan diikuti beberapa perusahaan properti di negeri Tirai Bambu lainnya, cukup menyita perhatian pelaku bisnis dunia dan tidak terkecuali di Indonesia.



Oleh Trismayarni Elen *

Situasi Dilematis Pemerintah

Dalam hal ini sudah pasti Kemenkeu RI tahu bagaimana kontribusi bisnis konstruksi bagi emisi karbon di Indonesia. Namun di masa pandemi Covid-19 ini, memang sangat dilematis sekali bagaimana mengangkat pertumbuhan ekonomi di sektor ini.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor jasa konstruksi pada kuartal II-2021 tumbuh 4,42%, mengalami pertumbuhan positif pertama kalinya setelah 12 bulan berada di zona merah.

Akan tetapi, kontribusi sektor konstruksi pada pertumbuhan ekonomi nasional berkurang secara tahunan dari 10,56% pada kuartal II-2020 menjadi 10,12% pada kuartal II-2021. Kontribusi sektor konstruksi pada PDB kuartal II-2021 masih di bawah sektor industri pengolahan (19,29%), serta sektor pertanian dan perdagangan yang masing-masing di level 14,27% dan 13,08%.

Masih berdasarkan data BPS, sepanjang kuartal II-2021 sektor properti hanya mencatatkan per-

Gapensi Iskandar Z Hartawi pada bulan April 2020, ekonomi dari sektor konstruksi di Indonesia melibatkan setidaknya 82% UMKM yang terdiri atas tukang, peralatan, material dan transportasi, (Supriyatna, 2020).

Pajak Karbon

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah lainnya melalui Kemenkeu yakni menetapkan pajak karbon yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2022. Apakah akan efektif?

Dalam pembagian biaya yang terkait dengan lingkungan, ada kategori biaya lingkungan karena kegagalan eksternal yang tidak ditanggung perusahaan, tapi ditanggung pihak lain, (IAI, 2015). Faktor inilah yang memungkinkan menjadi tanggungan pihak lain termasuk pemerintah. Contohnya kebakaran hutan, banjir bandang dan longsor, akibat pembabatan hutan dan bukit.

Jika melihat aktivitas bisnis konstruksi, apakah dengan pajak karbon ini akan menghasilkan angka yang signifikan antara apa yang pemerintah terima dari pajak karbon dengan yang harus ne-

gas rumah kaca/emisi karbon. Jika menyusuri jalan dari Tangerang ke arah Demak, pemandangan yang dijumpai adalah gundulnya bukit-bukit yang tanahnya dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. Dampaknya, banjir bandang tidak terelakkan di beberapa wilayah Demak, seperti yang terjadi pada awal tahun 2020.

Bencana alam banjir yang terjadi di awal tahun 2021 lalu di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, dan menjadi banjir yang terparah selama ini, juga karena kekurangnya hutan Kalimantan. Hutan selain sebagai paru-paru dunia, juga sebagai wahan penyerapan air.

Pembangunan infrastruktur di wilayah Cikarang hingga Cikampek juga dinilai berambil pada terjadinya banjir besar awal tahun 2021 yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat setempat dan sudah pasti juga menjadi beban pemerintah daerah.

Peran Profesi Akuntan
Seperti halnya yang dihadapi Kemenkeu, maka akuntan yang berada di perusahaan juga merupakan perhatian lebih dalam hal keberlanjutan usaha dalam *Corporate Sustainability Report* yang mengusung sinergi penyelamatan *Profit, People and Planet*, dengan *Triple Bottom Accounting*.

Pastinya para akuntan tersebut mengetahui dan memahami bahwa aktivitas yang dilakukan perusahaan konstruksi tempat ia bekerja adalah ada yang berdampak negatif pada *people*, baik di dalam maupun di lingkungan *planet*, namun tidak berdaya.

Dilema yang dihadapi adalah, mana yang harus didahulukan antara *going concern* atau *sustainability* sebuah usaha? Meskipun beberapa asosiasi profesi serta akademisi akuntan berusaha semaksimal mungkin menyajikan se-

para teori dan definisi di buku-buku atau modul sebagai pegangan dan acuan profesi akuntan, serta aturan yang tertuang di Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam situasi seperti itu, tindakan harus tetap dilakukan, tidak bisa menunggu lama untuk menghindari ancaman perubahan iklim, terutama bagi pelaku bisnis konstruksi dan properti. Aksi dan tindakan nyata oleh para profesional teknik sipil dan arsitek di bidang konstruksi sangat dibutuhkan untuk mencari bahan-bahan yang ramah lingkungan.

Selain itu, profesi akuntan (akuntan manajemen dan akuntan publik), yang berinteraksi langsung dengan perusahaan dan pengusaha perlu untuk terus menggiatkan pemahaman pengusaha untuk mengejar *profit* tanpa melukai dan merusak dari *people* dan *planet*. Mengingat profesi akuntan juga mengetahui betul isi laporan keuangan yang merupakan muara dari semua aktivitas operasional perusahaan.

Sehingga pada akhirnya komitmen untuk menjaga keseimbangan lingkungan dalam pembangunan tidak sekadar menjadi slogan tanpa tindakan nyata yang berdampak signifikan. Dampak perubahan iklim begitu serius, dan karenanya menjadi bahasan penting dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-26) yang digelar 31 Oktober-12 November 2021 lalu.



Aksi dan tindakan nyata oleh para profesional teknik sipil dan arsitek di bidang konstruksi sangat dibutuhkan untuk mencari bahan-bahan yang ramah lingkungan.

tumbuhan sebesar 2,82%. Kontribusi sektor properti terhadap pertumbuhan ekonomi nasional di periode ini mencapai 7,07%.

Upaya pemerintah mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi bisnis properti di masa krisis ekonomi tahun 2020 yakni melalui kebijakan perbankan dengan memberi stimulus bunga kredit yang sangat rendah untuk pertumbuhan sektor properti.

Ditambahkan pula pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa isu perubahan iklim dan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari isu *Sustainable Development Goals*. Di mana perlu adanya keseimbangan antara menjaga alam dan melakukan pembangunan, (Setneg, 2021).

Sektor konstruksi secara langsung dan tidak langsung memberikan dampak terhadap peningkatan emisi karbon (gas rumah kaca). Karena bidang konstruksi banyak menggunakan bahan-bahan seperti semen, baja dan kayu.

Menurut Ketua Umum BPP

gara keluaran untuk menanggung dampak negatif yang ditimbulkan dari rantai bisnis konstruksi, termasuk yang ditanggung masyarakat sekitar perusahaan?

Sebagai misal, produsen semen yang berkontribusi meningkatkan emisi karbon udara karena menggunakan bahan bakar konstruksi.

Sayangnya, stimulus tersebut belum mampu secara maksimal mengatasi pelambatan pertumbuhan ekonomi di sektor konstruksi ini. Sehingga dampak ekonomi masih terasa di sebagian masyarakat Indonesia termasuk UMKM yang bergantung dari perbaikan ekonomi di sektor konstruksi termasuk properti.

Banyak peristiwa yang akhirnya terjadi akibat pembabatan hutan seperti kekeringan, kebakaran hutan, banjir bandang dan longsor. Problematika perubahan iklim tidak hanya tentang

*) Praktisi dan Akademisi Akuntan, Pemerintah Bisnis dan Keuangan UMKM.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)

Jl. Hanglekir I No.8, Jakarta Pusat 10270 Telp. (021)7246523, 7210908, Fax. (021) 7252684
E mail : feupdm@yahoo.com Website : www.moestopo.ac.id

SURAT TUGAS

No:12/ST/DEK/FEB/UPDM/IX/2021

Dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Semester GASAL dan GENAP Tahun Akademik 2021/2022 dengan ini Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memberi tugas kepada :

No	N a m a	Jabatan
1.	Dr. Usmar Ismail, SE., MM.	Dosen
2.	Dr. Hendi Prihanto, SE., M.AK.	Dosen
3.	Dr. Tamrin Lanori, SE., M.Si.	Dosen
4.	Trismayarni Elen, SE., M.Si.	Dosen

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Demikian surat tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 13 September 2021

